

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masalah utama pada penelitian ini yaitu kemandirian ekonomi pesantren, dimana Pesantren sebagai lembaga pendidikan di era modern saat ini telah banyak bertransformasi tidak lagi sekedar memainkan fungsi tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan islam yang melakukan transmisi dan transfer ilmu agama Islam dengan sistem tata kelola tradisional serta ekosistem perekonomian pesantren konvensional ciri khas pesantren tradisional. Lebih dari itu saat ini Pesantren menjadi pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi Masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup; dan lebih penting lagi pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekitarnya.¹ Sehingga dikotomi ekonomi pesantren yang lekat dengan sumbangan dari Masyarakat kini telah bergeser pada pembangunan ekosistem ekonomi di lingkungan Pesantren sebagai indikator lepasnya ketergantungan pesantren pada pendanaan yang tidak menentu dan bertransformasi memiliki kemandirian ekonomi pesantren.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menempatkan pesantren sebagai stakeholder yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, khususnya industri halal. Kegiatan unit usaha pesantren di sektor produk halal dan penyediaan jasa layanan keuangan syariah, dapat bermafaat bagi kesejahteraan pesantren dan masyarakat sekitar.² Pernyataan tersebut sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018) bahwa pesantren turut berperan dalam halal *value chain* nasional. Unit usaha pesantren menjadi salah satu input industri halal nasional yang dapat mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan secara aktif membangun sumber daya manusia industri halal di Indonesia. Potensi pesantren sebagai salah satu pusat ekonomi syariah

¹ Qurrata A'yuni et al., "Penerapan Algoritma K-Means Clustering Untuk Mengetahui Pola Penerima Beasiswa Bank Indonesia (BI)," *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)* 4, no. 3 (2023): 530–39, <https://doi.org/10.47065/josyc.v4i3.3343>.

² S., Fasa, M. I., & Suharto Andriyanti, "Sharia Bank Marketing Management Concepts," *EKSYAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2022.

di Indonesia perlu untuk diberdayakan. Menurut data Kementerian Agama tahun 2004, baru terdapat 1,529 pesantren yang mengembangkan usaha bidang agribisnis, 404 pesantren bidang perindustrian, 111 pesantren bidang perdagangan, dan 41 pesantren mengembangkan bidang ekonomi kelautan dan perikanan. Jumlah tersebut hanya sekitar 0.96% dari total 21,521 pesantren yang ada di Indonesia saat itu. Pada tahun 2019, Kementerian Agama mempublikasikan data potensi ekonomi pesantren di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 9008 pesantren yang berpotensi mendirikan unit usaha. Jumlah tersebut sekitar 32% dari total 27,722 pesantren di Indonesia.³

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi pesantren di Indonesia masih perlu dioptimalkan. Pengoptimalan unit usaha pesantren dalam jangka panjang dapat menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, sehingga dalam pengelolaannya pesantren tidak lagi bergantung pada iuran santri maupun bantuan pihak lain. Meski masih terbatas, saat ini pengembangan unit usaha pesantren telah terjadi secara sporadis di beberapa pesantren, terutama pesantren yang memiliki *endowment factor* cukup besar dalam bentuk aset dan jumlah santri lulusan.⁴

Keberhasilan lembaga pendidikan berkaitan erat dengan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam pendidikan, khususnya di Lembaga pendidikan islam pondok pesantren. Salah satu sumber daya yang dimaksud yaitu pembiayaan. Pengelolaan biaya seharusnya efisien, efektif, dan tepat, sehingga lembaga pendidikan dapat mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. pembiayaan menentukan keberhasilan lembaga pendidikan. Keberhasilan ini didukung oleh sumber daya dan manajemen pembiayaan. Lembaga pendidikan dari semua jenjang pendidikan, mulai dari prasekolah, sekolah hingga perguruan tinggi, merupakan entitas organisasi yang memerlukan uang untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya. Uang ini termasuk sumber daya yang langka dan terbatas. Oleh karena itu, uang tersebut

³ Tim Pekapontren, *Potensi Ekonomi Pesantren Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).

⁴ Bank Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia., *Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat membantu mencapai tujuan pendidikan.⁵

Pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk dikembangkan. Mengingat fenomena saat ini pondok pesantren sebagian besar sumber pendanaannya dari dua sumber yang dominan yaitu santri sebagai peserta didik dan donasi para alumni dan simpatisan. Pondok Pesantren memiliki potensi pembiayaan yang besar. Potensi tersebut dapat berasal dari sumber dana donasi, wakaf, usaha, dan lain sebagainya. Selama ini lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren hampir 100% sangat bergantung terhadap dana donasi. Fokus utama pimpinan Pondok Pesantren seringkali terbatas pada penyelenggaraan pendidikan. Sementara unit usaha yang mendukung kemandirian pembiayaan belum dilakukan. Adanya unit usaha yang dikelola pondok pesantren menjadi potensi sumber pembiayaan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian donasi yang diterima dapat lebih optimal disalurkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam, khususnya Pondok Pesantren.⁶

Secara lebih jelas, pengembangan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan bagi santri, tetapi juga memperkuat biaya operasional pesantren. yaitu terdapat didalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Oleh karena itu, sangat penting untuk pihak pemerintah maupun pesantren untuk cakup mencari potensi dan mampu melihat peluang apa saja yang hadir sehingga perkembangan ekonomi pesantren dapat diraih, diperlukan adanya pergerakan dari pesantren itu terkait dengan pemberdayaan manajemen pondok pesantren sehingga pesantren dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah ekonomi umat pada umumnya, serta mensejahterakan pondok pesantren itu sendiri pada khususnya. Dengan demikian, selain sebagai lembaga yang

⁵ A. Rofiq, "Wealth Management Strategi Pengelolaan Aset: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi," *AL-TANZIM; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 76–88.

⁶ Muhammad Anggun Manumanoso Prasetyo, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Mendukung Kebijakan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Di Kabupaten Aceh Tenggara," *IAIN Lhokseumawe: PRODU* 1, no. 1 (2019).

bergerak dalam pengembangan aspek dakwah dan pendidikan Islam, seharusnya pendidikan juga bergerak dalam pengembangan ekonomi.⁷

Sumber pembiayaan yang terbatas tersebut perlu dikelola dan dikembangkan tidak hanya sebatas konsumtif untuk memenuhi kebutuhan operational saja, tetapi dikembangkan dengan membentuk ekosistem perekonomian pesantren. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan suatu lembaga pendidikan terhadap dana yang bersifat donasi. Pengembangan pesantren sebagai kekuatan ekonomi baru di Indonesia akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan kemampuan pesantren dan SDM yang ada dalam melaksanakan prinsip manajemen pengelolaan keuangan pondok pesantren, dengan manajemen pengelolaan keuangan tersebut pesantren akan dapat mengatur dan memanfaatkan secara maksimal segala potensi yang dimiliki. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu unsur yang penting dalam sebuah lembaga pendidikan atau dalam hal ini pondok pesantren agar menjadi lembaga pendidikan yang mandiri. ada dua hal yang menyebabkan besarnya perhatian terhadap keuangan. Pertama, keuangan sebagai kunci penentu keberlangsungan dan kemajuan dalam sebuah Lembaga pendidikan. Sehingga program-program pembaruan atau pengembangan pendidikan akan mengalami kegagalan ketika tidak didukung oleh keuangan yang memadai. Kedua, lazimnya keuangan sulit didapatkan dalam jumlah yang besar khususnya bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta yang baru berdiri. Saihudin, Manajemen Institusi Pendidikan.⁸

Sebagai konsekuensi dari hal itu, manajemen pembiayaan pesantren perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan pembelajaran, dan meningkatkan prestasi dan keterampilan para santri. Selama ini banyak pesantren yang belum memisahkan antara harta kekayaan pesantren dengan individu, walaupun disadari bahwa pembiayaan pesantren justru lebih banyak bersumber dari kekayaan individu sebab sumber-sumber lain yang menjadi penopang keuangan pesantren masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan

⁷ O. A., Asyari, H., & Ratnaningsih, S Gunawan, "Manajemen Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman Bogor," *Indonesian Journal of Islamic Educational Managemen* 5 (2022): 12–22.

⁸ Saihudin, Manajemen Institusi Pendidikan (Probolinggo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

bahwa pelaporan keuangan pesantren masih banyak yang tidak mengikuti regulasi yang ada.⁹

Manajemen pembiayaan pondok pesantren merupakan pengelolaan manajemen terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha pesantren untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk proses pendidikan di dalamnya dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Akibatnya, sehingga Manajemen pembiayaan salah satu dari bagian manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan pondok pesantren. Maka dari itu keberhasilan pondok pesantren dapat dilihat salah satunya dari manajemen pembiayaan. Mulai dari cara mendapatkan dana untuk pembangunan pondok.

Manajemen pembiayaan menjadi penting untuk diperhatikan dengan alasan agar dapat menggunakan dana secara efektif dan efisien, dan membuat laporan keuangan yang sesuai standar. Manajemen pembiayaan pondok pesantren merupakan salah satu substansi manajemen lembaga pendidikan yang akan turut menentukan kelancaran kegiatan pondok pesantren. Seperti halnya yang terjadi pada substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen pembiayaan pondok pesantren seyogyanya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen pembiayaan berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban.

Manajemen pembiayaan pondok pesantren dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya.¹⁰

⁹Rahmawati, H. S., Andi Kusumawati, "Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Pesantren Alam Indonesia Yang Mandiri Dan Berkelanjutan," Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 7 (2023): 711–19.

¹⁰ Eti Nurhayati, Psikologi Pendidikan Inovatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Dalam hal ini, maka pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya manajemen pengelolaan keuangan Pondok Pesantren adalah untuk memastikan efektifitas dan produktifitas penggunaan dana dan anggaran yang dimiliki. Artinya bahwa dana yang dimiliki pesantren dapat terbelanjakan, terdistribusi, dan terserap secara produktif. Akan tetapi, pada kenyataannya, tidak semua pesantren di Indonesia ini dapat mengelola keuangannya secara produktif dengan menggunakan dana dan anggaran yang tersedia untuk membuka unit-unit usaha pondok pesantren sebagai usaha dan upaya agar pesantren dapat mandiri secara ekonomi. Bersamaan dengan itu juga, Tidak sedikit pondok pesantren yang memiliki sumber daya, baik manusia maupun alamnya namun belum tertata dengan rapi, belum termanajemen dan terkelola secara efektif, dan produktif termasuk yang berkaitan dengan potensi ekonomi dan keuangan yang dimiliki pondok pesantren.

Selain itu, kemandirian ekonomi pesantren adalah keterlepasan pesantren dari pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan finansialnya demi keberlangsungan proses pendidikan di dalamnya. Artinya, sebuah keberadaan dimana pesantren mampu secara internal menjadi lembaga pendidikan yang berdikari berbasis swadaya sumber daya yang ada di dalamnya. Dari ini bisa dipahami bahwa kemandirian ekonomi pesantren merupakan sebuah tuntutan dewasa ini, karena jika pesantren tersebut secara ekonomi telah mandiri maka dalam segala proses keberlangsungan pendidikan akan dapat dijalankan dengan lancar dan baik, tentunya terhindar dari kendala atau hambatan yang timbul sebab dari perekenomian yang rendah. Terkait kemandirian perekonomian pula, bagi seluruh warga pesantren peran kiai menjadi sangat penting dan sudah tentu sangat berdampak kepada bidang-bidang dan komponen komponen yang ada dalam pesantren.

Manajemen ekonomi mandiri ini telah banyak terjadi pada beberapa pondok pesantren yang berkembang dan maju di Indonesia. Dengan cara memprioritaskan implementasi manajemen ekonomi yang profesional, dapat memandirikan sistem ekonomi itu sendiri sehingga berimplikasi terhadap perkembangan layanan pendidikan yang disediakan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh implikasi manajemen yang baik terhadap sistem perekonomian pondok pesantren, kemudian mengalir dari sistem perekonomian yang baik berimplikasi baik terhadap berdirinya usaha-usaha baru di lingkungan pondok pesantren, kemudian dengan banyaknya usaha tersebut

maka berkontribusi besar terhadap banyaknya pendapatan usaha Pondok Pesantren yang kemudian dapat memenuhi kebutuhan layanan pendidikan.¹¹

Sebagai contoh Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis. Kedua pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren yang telah memiliki ekosistem ekonomi di pondok pesantren dengan fasilitas pembelajaran yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi untuk dieksplorasi bagaimana manajemen pembiayaannya pondok pesantren sehingga terwujud kemandirian ekonomi pesantren.

Pertama, Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan informasi bahwa Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya termasuk pesantren yang sudah mapan ekonominya di Indonesia. Terbukti pondok pesantren ini masuk dalam buku Top 10 Ekosantri Pionir Kemandirian Pesantren yang diterbitkan oleh Puslitbang Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2017. Kemapanan itu dibuktikan dengan segala fasilitas penunjang santri yang murni dibangun berasal dari usaha bordir yang dimiliki pondok pesantren Al-Amin Tasikmalaya Pondok pesantren Al-Amin Tasikmalaya lahirnya dari Pabrik Bordir pada tahun 1985 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tjiwulan (YPI Tjiwulan) dan sekarang berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Amin, dengan pertimbangan jumlah santri dan unit usaha yang terus bertambah.

Hampir empat puluh tahun sudah usaha border Tjiwulan maupun lembaga berdiri. Garmen dan usaha keterampilan bordir masih menjadi fondasi berdirinya Pesantren Al-Amin khususnya dan Yayasan Al-Amin pada umumnya. Bahkan, kini melebarkan sayap kebermanfaatannya dengan membuka unit-unit lainnya, semisal bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, pendidikan kewirausahaan masyarakat, pendampingan usaha keluarga berbasis pengrajin bordir, sampai bekerjasama dengan instansi pemerintahan untuk menyelenggarakan balai pelatihan kerja. Kehadiran Pesantren Al-Amin membuat ekonomi masyarakat dapat terbantu, Pesantren yang juga membuka lembaga pendidikannya tidak hanya bagi santri yang mukim, menjadi solusi lembaga pendidikan keagamaan bagi masyarakat yang memerlukannya. Hingga

¹¹ M Rifa'i, "Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2019, 30–44.

kini, pembangunan sarana dan fasilitas sampai gaji karyawan Pesantren dapat terus berjalan dengan mandiri.

Pengembangan usaha kerajinan bordir dan pengembangan industri garmen yang berintegrasi dengan pendidikan pesantren telah memberikan kemandirian Al-Amin. Tidak hanya soal kemandirian pendidikan tetapi juga kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi membawa nilai manfaat untuk aktivitas pendidikan Islam. Sebaliknya aktivitas pendidikan Islam memberi manfaat bagi perusahaan yang telah diwarnai oleh kultur dan tradisi keislaman dan kepesantrenan.¹²

Kedua, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan informasi bahwa Pondok Pesantren di Kelola di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Susuru dengan memiliki pendidikan formal maupun non formal yaitu; Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru, Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Susuru, Sekolah Menengah Kejuruan Al-Ikhlas Susuru, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Al-Ikhlas Susuru, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Al-Ikhlas Susuru, Koprasi Pondok Pesantren dan Unit Usaha Pondok Pesantren.

Ekosistem ekonomi pondok pesantren telah terbentuk dan berjalan dengan adanya unit usaha dan koperasi pesantren serta Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis merupakan pondok pesantren yang telah menerima program *One Pesantren One Product* (OPOP) Dimana program ini merupakan program unggulan Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk mendorong kemandirian pesantren dan mengembangkan perekonomian umat melalui para santri.¹³

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana manajemen pembiayaan yang berdampak pada Kemandirian Ekonomi pondok pesantren di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis sehingga temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.

¹² Observasi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya pada Tanggal 25 Maret 2024

¹³ Observasi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis pada Tanggal 20 Maret 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian mengenai pengembangan manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis?
2. Bagaimana sumber dan alokasi pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis?
3. Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan terhadap kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis?
4. Bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis?
5. Bagaimana dampak manajemen pembiayaan terhadap kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi:

1. Perencanaan pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.
2. Sumber dan alokasi pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.
3. Implementasi manajemen pembiayaan terhadap kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.
4. Evaluasi manajemen pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.

5. Dampak manajemen pembiayaan terhadap kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengembangan manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis bagi pondok pesantren dalam mengembangkan manajemen pembiayaan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren,. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dalam pengembangan manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi di Pondok Pesantren.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan panduan terhadap dalam pengembangan manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi oleh pengelola pondok pesantren pada umumnya, khususnya Pondok Pesantren Al-Amin Tasikmalaya dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Susuru Ciamis.

E. Kerangka Berpikir

Lembaga pendidikan keagamaan atau Pondok Pesantren memiliki potensi pembiayaan yang besar. Potensi tersebut dapat berasal dari sumber dana donasi, wakaf, usaha, dan lain sebagainya . Selama ini lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren hampir 100% sangat bergantung terhadap dana donasi. Fokus utama pimpinan Pondok Pesantren seringkali terbatas pada penyelenggaraan pendidikan. Sementara unit usaha yang mendukung kemandirian pembiayaan belum dilakukan. Adanya unit usaha yang dikelola pondok pesantren menjadi potensi sumber pembiayaan yang dapat dikembangkan. Dengan demikian donasi yang diterima dapat

lebih optimal disalurkan kepada masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya.¹⁴

Pembiayaan menentukan keberhasilan lembaga pendidikan. Keberhasilan ini didukung oleh sumber daya dan manajemen pembiayaan. Semua unsur pendidikan membutuhkan pembiayaan, salah satunya pembiayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia unggul diperoleh apabila lembaga pendidikan mampu mengalokasikan biaya untuk merekrut dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang kompeten. Model pembiayaan yang ada saat ini sangat beragam, hampir setiap lembaga pendidikan memiliki ciri khas dalam pembiayaan pendidikan. Pada taraf nasional, ada negara yang bertanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan, dan ada pula negara yang berbagi dengan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Model pembiayaan yang diterapkan akan menentukan arah pengembangan institusi pendidikan yang bersangkutan.¹⁵

Penelitian manajemen pembiayaan yang berdampak pada Kemandirian Ekonomi pondok pesantren ini berlandaskan tiga landasan teori yaitu teori utama *grand theory*, teori penengah (*middle theory*) yang berfungsi menjelaskan masalah penelitian; penjelasan paradigma objek yang diteliti, dan aplikatif teori (*applied theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori dalam masalah yang menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti tersebut.

1. *Grand Theory* (Pembiayaan Pendidikan)

Human Capital Theory yang dikembangkan oleh Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker memandang pendidikan sebagai bentuk investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Schultz menjelaskan bahwa pengeluaran untuk pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan, dan kesehatan merupakan investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produktif individu serta memberikan manfaat ekonomi pada masa mendatang.¹⁶ Becker selanjutnya menegaskan bahwa modal

¹⁴ Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Mendukung Kebijakan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren Di Kabupaten Aceh Tenggara," *IAIN Lhokseumawe: PRODU* 1, no. 1 (2019).

¹⁵ Nur Fadilah, "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Masyarakat Di MTs Pakis Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas" (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

¹⁶ Theodore W. Schultz, "Investment in Human Capital," *The American Economic Review* 51, no. 1 (1961): 1–17.

manusia terbentuk melalui proses investasi dalam pendidikan, pelatihan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas serta kapasitas individu dalam menghasilkan pendapatan dan nilai ekonomi.¹⁷

Berdasarkan perspektif tersebut, pembiayaan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga, tetapi sebagai investasi jangka panjang yang diarahkan pada peningkatan kualitas, kompetensi, produktivitas, dan kemampuan sumber daya manusia dalam menciptakan nilai ekonomi bagi individu maupun organisasi.

Dalam konteks penelitian Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren Berbasis Kemandirian Ekonomi, Human Capital Theory menjelaskan bahwa pembiayaan pesantren merupakan investasi strategis dalam pengembangan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia. Investasi pada pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, dan kemampuan manajerial dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan unit usaha, diversifikasi pendapatan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, pengembangan modal manusia menjadi faktor strategis dalam mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal serta memperkuat kemandirian ekonomi dan keberlanjutan pembiayaan pesantren.

2. *Middle Theory* (Manajemen Pembiayaan Pendidikan).

Teori *budgetting* menurut Lipham (1985) bahwa manajemen keuangan, penganggaran, dan pembiayaan pendidikan termasuk mendapatkan dan menetapkan dana, memanfaatkannya, melaporkan, memeriksa, dan bertanggung jawab.¹⁸ Sebagaimana dikemukakan Matin (2014) bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki arti sama dengan pengelolaan dana pendidikan, yang terdiri dari sistem penganggaran pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, menentukan alokasi anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, dan pengawasan anggaran.¹⁹

3. *Applied Theory* (Kemandirian Ekonomi)

¹⁷ Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, 3rd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1993).

¹⁸ Lipham Sm, *The Principleship: Concepts, Competencies And Cosos* (London: Longmar, 1985).

¹⁹ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Pondok Pesantren dengan ekonomi mandiri berarti sebuah lembaga yang memiliki kemampuan memilih dan melakukan kegiatan untuk bisa bertahan hidup dengan lebih baik, memberikan layanan pendidikan yang sempurna dan berkualitas. Dengan demikian kemandirian yang dimaksud merupakan suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan, sering dikaitkan dengan pengembangan diri, dan selalu terkait dengan perihai menjadi diri menjadi lebih produktif dalam berbagai aspek kehidupan sehingga berkontribusi bagi orang lain. Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai suatu tujuan, tanpa menutup diri terhadap perkembangan yang ada dengan strategi bekerjasama, dengan cara belajar dan mendengarkan dari pihak-pihak lain selama hal tersebut memberikan keuntungan bagi sebuah usaha.²⁰

Perekonomian yang mandiri sebuah Pondok Pesantren bertujuan guna meningkatkan layanan pendidikan menjadi berkualitas, sehingga bangsa ini pun menjadi berkualitas.²¹ Salah satunya adalah dengan cara berwirausaha, yaitu menjalankan usaha ekonomi sendiri, menciptakan unit-unit usaha baru, dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang profit di lingkungan Pondok Pesantren. dan ini merupakan kewajiban dalam mengimplementasikan semangat menjadi manusia yang tidak merugi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.

Semangat kemandirian (*self-help*) dan percaya diri (*self-reliance*) perlu untuk ditumbuhkan guna menciptakan keadaan bahwa kita akan dapat menjadi pihak yang lebih baik yang siap bersaing dengan baik melalui usaha-usaha mandiri yang bermanfaat secara berkelanjutan.²² Semangat kemandirian yang tidak selalu bergantung kepada pihak lain. Dengan pengimplementasian manajemen ekonomi yang baik maka hal tersebut dapat tercapai. Bila tidak maka sebesar apapun usaha tersebut namun tidak dilakukan dengan manajemen ekonomi yang baik, maka kegagalan akan datang juga pada akhirnya.

²⁰ A. G Mustaan, "Gaya Kepemimpinan Kiai Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Pesantren," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 2 (2020): 30–46.

²¹ Edy Imam Supeno, "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam* 6 (2019): 79–94.

²² I., Ghaziyya, "Pengelolaan Pesantren Melalui Usaha Mandiri Di Pesantren Modern Babun Najah Banda Aceh " (UIN Ar-Raniry , 2023).

Perwujudan dalam pengembangan ekonomi mandiri tersebut tentu perlu diiringi dengan semangat kewirausahawanan yang harus berkarakteristik sebagai pencari peluang (*opportunity founder*), harus berani mengambil sebuah risiko, jiwa dan sikap mandiri dalam melakukan suatu usaha atau terobosan, selalu percaya diri yaitu positive thinking dengan segala apa yang direncanakan dan yang akan terjadi, memiliki keberanian untuk menjadi pihak yang berhasil yang akan menuai profit, serta memiliki kemauan untuk membantu orang lain guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan sebagai implementasi dari ajaran Islam yaitu tolong menolong dan bersedekah.²³

Dengan demikian, berdasarkan kajian teori tersebut peneliti berpendapat bahwa ekonomi mandiri Pondok Pesantren memberikan arti bahwa Pondok Pesantren tersebut dapat melakukan usaha-usaha ekonomi di dalam maupun di luar lingkungan Pondok tersebut secara fokus terhadap pengembangan dan ekspansi usaha yang dilakukan dengan manajemen yang baik, agar dapat menjalankan kewajiban memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat dengan dukungan pendanaan dari usaha-usaha tersebut secara sirkulatif dan memadai sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat internal dan eksternal Pondok Pesantren.

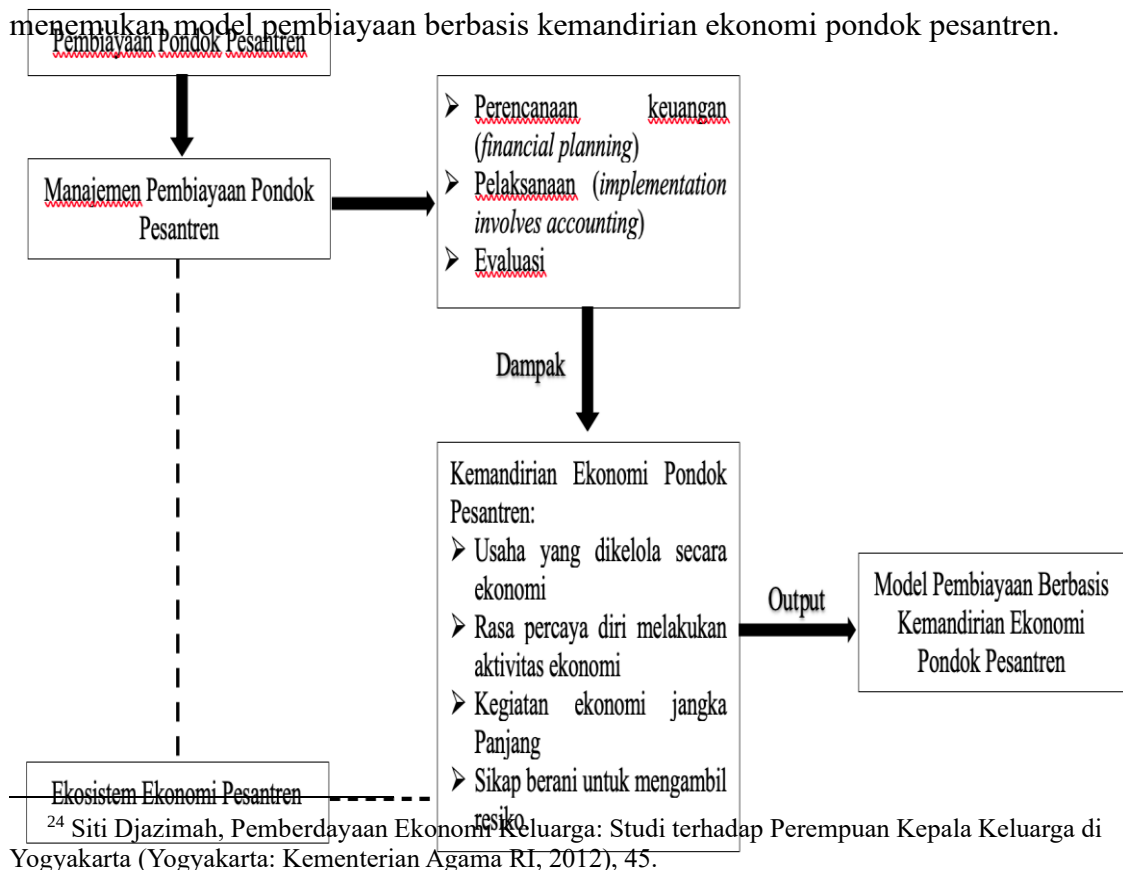
Menurut Priambodo sebagaimana yang dikutip oleh Siti Djazimah mengungkapkan bahwa kemandirian ekonomi memiliki karakteristik atau ukuran-ukuran tertentu, diantaranya:

1. Memiliki usaha yang dikelola secara ekonomi. Artinya usaha atau pekerjaan itu berorientasi pada keuntungan.
2. Memiliki rasa percaya diri dalam melakukan aktivitas ekonomi, seperti usaha dagang, wirausaha dalam bentuk home industri, pengelolaan perusahaan dan lain sebagainya.
3. Adanya kegiatan ekonomi yang ditekuni dalam jangka Panjang sehingga memungkinkan mempunyai kekuatan untuk maju dan berkembang.

²³ Kurniawan, "Manajemen Kerjasama Pondok Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah Dengan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Pendidikan," *Quality 2* (2014): 21–55.

4. Memiliki sikap berani untuk mengambil resiko, misalnya berani meminjam uang sebagai modal usaha dengan perhitungan rasional dan realistis, berani mengambil keputusan bersifat bisnis untuk memprediksi peluang-peluang yang ada.²⁴

Berikut deskripsi dari kerangka berpikir bahwa manajemen pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan pondok pesantren meliputi; Pertama, perencanaan keuangan (*financial planning*); bagaimana dana diperoleh, dari mana sumbernya dan untuk apa dana dibelanjakan, mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan. Kedua, pelaksanaan (*implementation involves accounting*) terdiri dari; sistem penganggaran pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, menentukan alokasi anggaran, penatausahaan keuangan pendidikan. Ketiga, evaluasi meliputi kegiatan; penilaian terhadap pencapaian tujuan dari yang didanai. Manajemen pembiayaan pondok pesantren mengarah pada kemandirian ekonomi pesantren dengan indikasi Memiliki; usaha yang dikelola secara ekonomi, rasa percaya diri dalam melakukan aktivitas ekonomi, Adanya kegiatan ekonomi yang ditekuni dalam jangka Panjang dan sikap berani untuk mengambil resiko. Sehingga outputnya menemukan model pembiayaan berbasis kemandirian ekonomi pondok pesantren.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Kajian Penelitian Terdahulu

- 1. Disertasi. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu (Penelitian di Pesantren Daarut Tauhid Bandung dan Pesantren Modern Sahid Bogor). Karya Nurhamzah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2019.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, sumber-sumber pembiayaan di kedua pesantren berasal dari pemerintah, orangtua, dan lembaga donatur. Dengan sumber-sumber tersebut, kedua pesantren sudah mempunyai kecukupan dana yang memadai untuk membiayai dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Kedua, implementasikan Kedua pesantren telah menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu secara efektif dan konsisten. Manajemen ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan peningkatan pembiayaan pendidikan. Ketiga, ada dua kategori faktor pendukung dan penghambat untuk menerapkan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu di kedua pesantren: faktor internal dan eksternal. Keempat, manajemen pembiayaan pendidikan berbasis mutu secara signifikan meningkatkan output dan hasil pembiayaan pendidikan.²⁵

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian manajemen pembiayaan pesantren. Adapun perbedaannya, penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yang lebih menfokuskan kepada manajemen pembiayaan berbasis mutu. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang fokus pada manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.

²⁵ Nurhamzah, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pesantren Berbasis Mutu: Penelitian Di Pesantren Daarut Tauhiid Bandung Dan Pesantren Modern Sahid Bogor" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

2. Disertasi. Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Melalui Ekonomi Pesantren di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso dan Nurul Qarnain Jember. Karya Hasan Sayfullah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukan bentuk ekonomi pesantren di pondok pesantren Al Ishlah sebanyak delapan aset dengan rincian kantin (koperasi), perkebunan sayur, pertambangan batubara, peternakan, peternakan ikan, toko bangunan, jasa penyeberangan laut dan pengelolaan hutan. Sedangkan di pondok pesantren Nurul Qarnain sebanyak tujuh usaha dengan rincian koperasi, bengkel, ternak ayam betelur, pertanian, batu piring, air mineral dan perkebunan. Manajemen pengelolaan aset milik pondok pesantren Nurul Qarnain dan Al Ishlah menggunakan model Planing, Organizing, Actuating dan Controlling. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa pondok pesantren Al Ishlah menggunakan struktural-fungsional sedangkan di Nurul Qarnain dipasrahkan pada seorang kyai. Pengembangan lembaga pendidikan Islam dengan ekonomi pesantren di pondok pesantren Nurul Qarnain menggunakan metode PDCA dalam bentuk penyediaan gedung sekolah, sarana-prasarana, AULA, pendirian lembaga pendidikan tingkat lanjut, subsidi makan sehari-hari dan beasiswa guru yang mengikat. Sedangkan di Pondok Pesantren Al Ishlah pengembangan lembaga pendidikan Islam dengan ekonomi pesantren menggunakan metode trilogy kualitas dengan bentuk penyediaan gedung, subsidi TABA dan BASA, pendirian lembaga pendidikan tingkat lanjut dan pemenuhan sarana-prasarana. Terakhir terkait kontribusi ekonomi pesantren dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren Al Ishlah dan Nurul Qarnain berbentuk mencukupi sarana prasarana lembaga pendidikan, membiayai keperluan pendidikan, balas jasa kepada para pengajar dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan.²⁶

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian ekonomi pesantren. Adapun perbedaannya, penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yang lebih fokus pada ekonomi pesantren sebagai bagian dari pengembangan lembaga pendidikan islam. Sedangkan peneliti melakukan

²⁶ Hasan Sayfullah, "Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Melalui Ekonomi Pesantren Di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso Dan Nurul Qarnain Jember" (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2019).

penelitian yang fokus pada manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.

3. Disertasi. Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Nilai Keadilan. Karya Edy Setyo Utomo Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2022.

Hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren belum menyentuh secara langsung ruang gerak pesantren dalam pengembangan ekonominya. Regulasi ini tidak secara khusus mengatur pengembangan ekonomi pesantren, pesantren masih memiliki kebebasan dan fleksibilitas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan regulasi yang berlaku. 2) KelemahanKelemahan a) Kelemahan Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren, b) Kelemahan Manajemen Pesantren, c) Sumber Daya Manusia di Pesantren, d) Keterbatasan modal dan akses pendanaan, e) Tidak adanya rincian strategi dan rencana aksi yang jelas 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program pengembangan ekonomi pesantren berbasis lokal, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan melalui kerjasama ekonomi. selanjutnya disebutkan Penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat berbasis lokal yang berkeadilan dan sejahtera. Kemudian dijelaskan secara rinci Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan ekonomi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: bantuan keuangan (modal); bantuan sarana dan prasarana untuk usaha; bantuan teknologi; dan/atau dalam pengembangan usaha serta pelatihan keterampilan SDM untuk menunjang ekonomi.²⁷

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian ekonomi pesantren. Adapun perbedaannya, penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yang lebih fokus pada ekonomi pesantren sebagai bagian dari pengembangan lembaga pendidikan islam. Sedangkan peneliti melakukan

²⁷ Edy Setyo Utomo, "Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang , 2022).

penelitian yang fokus pada manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.

4. Disertasi. Pondok Pesantren dalam Perspektif Ekonomi: Studi Kewirausahaan Pesantren di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Karya Zulfikri Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.

Penelitian ini membuktikan bahwa perkembangan kewirausahaan di pesantren terjadi disebabkan karena adanya pendidikan karakter yang membentuk santri untuk mandiri. Perkembangan kewirausahaan tersebut didukung dengan ketersediaan berbagai wahana penunjang baik secara internal maupun eksternal pesantren. Fenomena ini diikuti pula dengan berbagai usaha ekonomi yang dijalankan pesantren. Gambaran ini melengkapi dan memperkuat pendapat Clifford Geertz dan beberapa peneliti lainnya seperti Lance Castles dan Nakamura serta Irwan Abdullah yang mengatakan bahwa kehidupan pesantren ditandai oleh suatu tipe etika dan tingkah laku ekonomi yang bersifat agresif, penuh watak kewirausahaan dan menganut paham kebebasan berwirausaha. Namun fenomena ini mengalami hambatan akses permodalan dari perbankan, dikarenakan Bank tidak menerima jaminan atau agunan berupa asset wakaf, sementara mayoritas asset pesantren adalah wakaf, selain hambatan dalam kebijakan ekonomi daerah.²⁸

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian ekonomi pesantren. Adapun perbedaannya, penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yang lebih fokus pada kewirausahaan sebagai pengembangan ekonomi pesantren. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang fokus pada manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.

5. Disertasi. Manajemen Pembiayaan Pesantren Berbasis Masyarakat di Pesantren Idrisiyyah Tasikmalaya dan Pesantren Darussalam Ciamis. Karya Dede Husni Mubarrok Program Doktor Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.

Temuan Penelitian ini yaitu; 1) Perencanaan pembiayaan di pesantren sangat memaksimalkan rencana strategi, sistem terbuka, dan transparansi dalam

²⁸ Zulfikri, "Pondok Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi: Studi Kewirausahaan Pesantren Di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan." (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018).

memanfaatkan sumber anggaran, hal tersebut dipengaruhi oleh persepsi kepemimpinan kiai yang berbeda. 2) Penggunaan dan penerimaan pembiayaan sudah menggunakan dana secara efektif dan efisien sesuai rencana kegiatan yang sudah ditetapkan, pesantren menjadi lembaga profit dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. 3) pelaksanaan evaluasi dilakukan satu kali, antara bulanan dan tahunan. Evaluasi ini ditentukan dari perolehan dana yang diterima oleh pihak pesantren.²⁹

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian pembiayaan pesantren. Adapun perbedaannya, penelitian ini terletak pada variabel yang diteliti yang lebih fokus pada manajemen pembiayaan Pesantren berbasis masyarakat. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang fokus pada manajemen pembiayaan pondok pesantren berbasis kemandirian ekonomi.



²⁹ Dede Husni Mubarrok, “Manajemen Pembiayaan Pesantren Berbasis Masyarakat Di Pesantren Idrisiyyah Tasikmalaya Dan Pesantren Darussalam Ciamis” (Program Doktor Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember , 2020).